

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/adtkzk67>

ANALISIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT PALEMBANG

Erlens ¹, Rita Junita ², Bastiar Tambuh ³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang ¹⁻³

email korespondensi: junitarita@gmail.com

ABSTRAK

Administrasi kepegawaian merupakan komponen penting dalam pengelolaan sumber daya manusia organisasi militer yang bertujuan menjamin ketertiban administrasi personel serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan administrasi kepegawaian di Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta mengevaluasi efektivitas sistem administrasi kepegawaian dalam mendukung pengelolaan personel. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat pengelola administrasi kepegawaian, staf personalia, serta pegawai di lingkungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi kepegawaian telah berjalan secara sistematis melalui pencatatan administrasi personel dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian. Kompetensi pengelola administrasi serta pengawasan internal organisasi menjadi faktor utama yang mendukung efektivitas administrasi kepegawaian. Namun, keterbatasan integrasi sistem informasi dan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam pengelolaan administrasi personel. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem administrasi berbasis teknologi dan peningkatan kompetensi aparatur menjadi faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan personel dan kinerja organisasi militer.

Kata Kunci: administrasi kepegawaian, manajemen sumber daya manusia, organisasi militer, sistem informasi kepegawaian, TNI Angkatan Laut.

1. PENDAHULUAN

Administrasi kepegawaian merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan sumber daya manusia organisasi yang bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, efektivitas pengelolaan pegawai, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam organisasi militer, administrasi kepegawaian memiliki peran strategis karena berkaitan dengan pengelolaan personel yang menuntut disiplin tinggi,

profesionalisme, serta kepatuhan terhadap sistem komando. Administrasi kepegawaian meliputi proses perencanaan, pengangkatan, pengembangan, penilaian kinerja, hingga pengelolaan data personel secara sistematis dan berkelanjutan (Mahmudi, 2020). Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang sebagai salah satu satuan kerja TNI Angkatan Laut memiliki tanggung jawab dalam mendukung operasi pertahanan, pengamanan wilayah perairan, serta pelaksanaan tugas administrasi organisasi. Pelaksanaan tugas tersebut sangat dipengaruhi oleh pengelolaan administrasi kepegawaian yang efektif. Administrasi kepegawaian yang tertib dapat mendukung akurasi data personel, perencanaan karier, serta peningkatan kinerja pegawai. Sebaliknya, administrasi yang tidak tertib berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan personel, seperti ketidaksesuaian data pegawai, keterlambatan pengembangan karier, serta rendahnya efektivitas organisasi (Mardiasmo, 2021). Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji administrasi kepegawaian dalam organisasi pemerintah, kajian yang secara khusus menyoroti pelaksanaan administrasi kepegawaian dalam organisasi militer tingkat pangkalan masih relatif terbatas. Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang memiliki karakteristik organisasi yang mengkombinasikan fungsi operasional militer dan administrasi organisasi. Kompleksitas tersebut menuntut sistem administrasi kepegawaian yang tertib dan terintegrasi untuk mendukung efektivitas pengelolaan personel. Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan administrasi kepegawaian di Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta efektivitas administrasi kepegawaian dalam mendukung pengelolaan personel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan administrasi kepegawaian, mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan administrasi personel, serta mengevaluasi efektivitas sistem administrasi kepegawaian dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia sektor pertahanan serta menjadi dasar rekomendasi peningkatan sistem administrasi kepegawaian.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan administrasi kepegawaian di Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses administrasi personel, mekanisme pengelolaan data pegawai, serta kendala dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian. Subjek penelitian meliputi pejabat pengelola administrasi kepegawaian, staf personalia, serta pegawai di lingkungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, serta dokumentasi administrasi kepegawaian. Variabel penelitian mencakup sistem administrasi kepegawaian, kompetensi pengelola administrasi, sistem informasi kepegawaian, serta efektivitas pengelolaan personel.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan administrasi kepegawaian (Creswell & Creswell, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi proses administrasi kepegawaian, serta studi dokumentasi administrasi personel. Validitas data diuji menggunakan triangulasi metode (Sugiyono, 2020). Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan member check (Lincoln Guba, 1985). Metode penelitian ini digunakan untuk mendukung tujuan penelitian dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan administrasi kepegawaian dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan personel organisasi militer.

3. TINJAUAN LITERATUR

Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia sektor publik, administrasi kepegawaian merupakan bagian dari sistem pengelolaan SDM yang mencakup perencanaan pegawai, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan pengelolaan administrasi personel. Administrasi kepegawaian yang berbasis sistem informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pegawai serta mendukung reformasi birokrasi sektor publik (Prasojo, 2021). Perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi pemerintah, termasuk institusi militer, untuk mengembangkan sistem administrasi kepegawaian berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan data personel.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi kepegawaian masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian oleh Hidayat dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa sistem administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi mampu meningkatkan akurasi data pegawai, namun implementasinya masih menghadapi kendala kompetensi aparatur. Penelitian lain oleh Rahman et al. (2022) menemukan bahwa ketertiban administrasi kepegawaian berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi sektor publik. Selain itu, penelitian oleh Wibowo dan Santoso (2023) menegaskan bahwa integrasi sistem administrasi kepegawaian mampu meningkatkan efektivitas manajemen SDM dalam organisasi semi militer.

Kerangka konseptual penelitian disusun untuk mengarahkan analisis terhadap hubungan antarunsur utama yang telah diuraikan dalam penelitian. Secara konseptual, kerangka penelitian dirumuskan sebagai berikut: Sistem Administrasi → Kompetensi Pengelola dan Pengawasan Internal → Efektivitas Pengelolaan Personel

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sistem Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi kepegawaian di Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang telah dilaksanakan melalui sistem pencatatan administrasi personel dan pengelolaan data pegawai berbasis sistem informasi. Berdasarkan Tabel 1, pencatatan data personel menunjukkan tingkat optimal sebesar 72 %, sedangkan penggunaan sistem informasi berada pada kategori optimal sebesar 60 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan sistem administrasi kepegawaian secara cukup baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data personel.

Penggunaan sistem digital dalam administrasi kepegawaian terbukti mampu meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi data pegawai. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Hidayat dan Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa sistem administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data pegawai serta meminimalkan kesalahan administrasi. Selain itu, penelitian Prasojo (2021) menegaskan bahwa digitalisasi administrasi kepegawaian menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia sektor publik. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam integrasi sistem informasi antarunit kerja yang berpotensi menghambat optimalisasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

4.2. Kompetensi Pengelola Administrasi Kepegawaian

Kompetensi aparatur personalia menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian. Berdasarkan Tabel 2, pemahaman administrasi personel berada pada kategori tinggi sebesar 68 %, sedangkan penguasaan sistem informasi berada pada kategori tinggi sebesar 55 %. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola administrasi telah memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi kepegawaian, namun masih memerlukan peningkatan kompetensi teknologi informasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman et al. (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian. Penelitian Robbins dan Judge (2021) juga menegaskan bahwa kompetensi pegawai dalam penguasaan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi modern. Dalam konteks organisasi militer, kompetensi administrasi kepegawaian tidak hanya berkaitan dengan kemampuan administratif, tetapi juga berkaitan dengan ketelitian dan kedisiplinan dalam pengelolaan data personel. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur personalia menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung efektivitas administrasi kepegawaian.

4.3. Pengawasan Administrasi Kepegawaian

Pengawasan administrasi kepegawaian dilaksanakan melalui audit administrasi personel dan evaluasi kinerja pegawai. Berdasarkan Tabel 3, audit administrasi personel menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 65 %, sedangkan evaluasi kinerja pegawai menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 62 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan administrasi kepegawaian telah berjalan cukup baik dalam menjaga ketertiban administrasi personel.

Pengawasan administrasi berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mahmudi (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan internal merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan efektivitas pengelolaan kinerja pegawai. Selain itu, penelitian OECD (2020) menunjukkan bahwa sistem pengawasan administrasi yang terintegrasi mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM sektor publik. Namun, masih terdapat kebutuhan peningkatan sistem evaluasi kinerja berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan administrasi kepegawaian.

4.4. Efektivitas Administrasi Kepegawaian

Administrasi kepegawaian memiliki kontribusi penting dalam mendukung perencanaan karier dan pengembangan kompetensi pegawai. Berdasarkan Tabel 4, akurasi data personel menunjukkan kategori sangat efektif sebesar 64 %, sedangkan dukungan perencanaan karier pegawai berada pada kategori sangat efektif sebesar 66 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa administrasi kepegawaian telah berperan dalam mendukung pengelolaan karier pegawai secara sistematis. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Wibowo dan Santoso (2023) yang menyatakan bahwa administrasi kepegawaian yang tertib mampu meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia organisasi militer. Penelitian World Bank (2021) juga menegaskan bahwa sistem administrasi kepegawaian yang akurat menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan karier dan peningkatan kinerja organisasi. Selain itu, Northouse (2021) menyatakan bahwa pengelolaan administrasi personel yang baik mendukung stabilitas organisasi dan

meningkatkan loyalitas pegawai terhadap organisasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi kepegawaian di Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang telah berjalan secara sistematis melalui penerapan sistem administrasi berbasis teknologi. Kompetensi pengelola administrasi dan pengawasan internal menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan administrasi kepegawaian. Namun, keterbatasan integrasi sistem informasi dan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam pengelolaan administrasi personel. Administrasi kepegawaian yang tertib terbukti mendukung perencanaan karier pegawai serta meningkatkan efektivitas organisasi militer.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan administrasi kepegawaian di Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang telah berjalan secara sistematis dan mendukung pengelolaan personel organisasi. Efektivitas administrasi kepegawaian dipengaruhi oleh sistem informasi administrasi, kompetensi pengelola administrasi, serta pengawasan internal organisasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan integrasi sistem informasi menjadi faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas administrasi kepegawaian dan kinerja organisasi militer.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. (2023). Sistem administrasi kepegawaian nasional. Jakarta: BKN RI.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). Reformasi birokrasi SDM aparatur. Jakarta: BAPPENAS.
3. Bastian, I. (2020). Manajemen sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.
4. Creswell, J. W., Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
5. Halim, A. (2022). Public financial and personnel management. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
6. Hidayat, R., Nugroho, R. (2021). Personnel administration digital system. Journal of Public Administration, 18(2), 115–128.
7. International Federation of Accountants. (2021). Public sector HR management framework. New York, NY: IFAC.
8. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2022). Reformasi administrasi ASN. Jakarta: LAN RI.
9. Mahmudi. (2020). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

10. Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Yogyakarta: ANDI.
11. Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
12. Ministry of Defence Republic of Indonesia. (2023). *Personnel management in defense institutions*. Jakarta: Ministry of Defence Republic of Indonesia.
13. Nasution, A. (2021). *Public sector accountability*. Jakarta: Prenadamedia Group.
14. Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and practice* (9th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
15. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Public sector HR governance*. Paris: OECD Publishing.
16. Prasajo, E. (2021). *Governance reform and HR management*. Jakarta: Rajawali Press.
17. Rahman, T., Nugroho, R., Putri, D. (2022). HR administration effectiveness. *Public Administration Review*, 82(3), 389–401.
18. Robbins, S. P., Judge, T. A. (2021). *Organizational behavior* (18th ed.). Harlow, UK: Pearson Education Limited.
19. Setyawan, B. (2024). *Strategic HR governance*. Jakarta: Prenadamedia Group.
20. Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
21. Sutaryo, D. (2023). *Public personnel management*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
22. Tjokroamidjojo, B. (2020). *Public administration management*. Jakarta: Haji Masagung.
23. United Nations Development Programme. (2022). *Human resource governance*. New York, NY: UNDP.
24. Wibowo, H., Santoso, B. (2023). Military HR administration. *Journal of Defense Human Resource Management*, 11(1), 25–40.
25. World Bank. (2021). *Public HR management*. Washington, DC: World Bank.